



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara cermat, hemat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur standar harga satuan pokok kegiatan;
 - b. bahwa komponen standar harga satuan pokok kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil tersebut serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kemampuan daerah;
 - c. perhitungan atas kebutuhan dan harga riil HSPK didasarkan pada usulan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat dan Dinas/Badan/Instansi terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh SKPD untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
4. Pembina adalah pejabat yang memiliki kapasitas untuk memberikan pembinaan atas kegiatan yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah.
5. Penanggungjawab adalah pejabat yang bertindak selaku penanggungjawab kegiatan, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD.
6. Ketua adalah pejabat yang bertindak selaku ketua dalam kegiatan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Sekretaris SKPD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk membantu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendaharawan Barang Daerah adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk mengurus, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada SKPD.
13. Pejabat Pengadaan Barang adalah Personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
14. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
15. Direksi/Pengawas Lapangan adalah staf Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK yang mendapat tugas melakukan pengawasan atas nama PPK terhadap pembangunan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan rencana dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan.
16. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
17. Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
18. Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat HST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
19. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah.
20. Pembangunan Rumah Negara yang selanjutnya disingkat PRN adalah bangunan yang dibangun dan dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri.
21. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.
22. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

23. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang selanjutnya disingkat ASDP adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
24. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
25. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi Kereta Api.
26. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bandar Udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
27. Jasa Konsultansi adalah kegiatan yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan.
28. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
29. Pengelolaan Kelautan dan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
30. Jaringan Internet dan adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer diseluruh dunia.
31. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) HSPK terkait dengan HST BGN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) HSPK terkait dengan HST PRN tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) HSPK terkait dengan Harga Satuan Tertinggi RLH OAP tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) HSPK terkait dengan HST PRBGN tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) HSPK terkait dengan HST PBGN rumah negara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) HSPK terkait dengan PKB PBGN tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) HSPK terkait dengan SPAM tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) HSPK terkait dengan PJJ tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) HSPK terkait dengan Pekerjaan Bangunan Irigasi, Normalisasi Sungai dan Pengamanan Abrasi Pantai tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) HSPK terkait dengan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) HSPK terkait dengan Fasilitas Keselamatan Transportasi Jalan tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (12) HSPK terkait dengan ASDP dan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (13) HSPK terkait dengan Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (14) HSPK terkait dengan Kebandarudaraan tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (15) HSPK terkait dengan Jasa Konsultansi tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (16) HSPK terkait dengan Ketenagalistrikan tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (17) HSPK terkait dengan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (18) HSPK terkait dengan Jaringan Internet dan Website tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (19) HSPK terkait dengan Pengadaan Peralatan Utama SMK dan SMA (DAK) tercantum data Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (20) HSPK terkait dengan Perangkat Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK) tercantum data lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 17 November 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D.MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 22

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
 TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA (HSTBGN)

No	KABUPATEN / KOTA	P E M B A N U N A N					
		BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2		PAGAR GEDUNG NEGARA PER METER			JALANLINGKUNGAN L=4 M ;T=20 CM ;K-300 PER M'
		TIDAK Sederhana (M2)	Sederhana (M2)	DEPAN (M')	BELAKANG (M')	SAMPING (M')	
	WILAYAH MANOKWARI RAYA						
1	KABUPATEN MANOKWARI - MANOKWARI	Rp 9.355.000	Rp 8.286.000	Rp 3.920.000	Rp 3.160.000	Rp 2.990.000	Rp 3.400.000
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - RANSIKI	Rp 9.030.000	Rp 8.211.000	Rp 3.920.000	Rp 3.030.000	Rp 2.860.000	Rp 3.294.000
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - BINTUNI	Rp 11.540.000	Rp 9.910.000	Rp 4.970.000	Rp 4.410.000	Rp 4.170.000	Rp 5.067.000
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - RASIEI	Rp 10.270.000	Rp 8.750.000	Rp 4.340.000	Rp 3.770.000	Rp 3.580.000	Rp 3.970.000
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - ANGGI	Rp 14.110.000	Rp 11.390.000	Rp 5.870.000	Rp 5.830.000	Rp 5.510.000	Rp 8.200.000
	WILAYAH SORONG RAYA						
6	KOTA SORONG - SORONG	Rp 9.000.000	Rp 7.850.000	Rp 3.820.000	Rp 2.990.000	Rp 2.840.000	Rp 3.135.000
7	KABUPATEN SORONG - AIMAS	Rp 9.200.000	Rp 8.300.000	Rp 4.210.000	Rp 3.250.000	Rp 3.080.000	Rp 3.040.000
8	KABUPATEN SORONG SELATAN - TEMINABUAN	Rp 12.230.000	Rp 10.300.000	Rp 5.040.000	Rp 4.510.000	Rp 4.310.000	Rp 6.300.000
9	KABUPATEN RAJA AMPAT - WAISAI	Rp 9.830.000	Rp 9.210.000	Rp 4.390.000	Rp 3.740.000	Rp 3.550.000	Rp 3.770.000
10	KABUPATEN TAMBRAUW - FEEF	Rp 9.820.000	Rp 9.470.000	Rp 4.290.000	Rp 3.560.000	Rp 3.340.000	Rp 3.930.000
11	KABUPATEN MAYBRAT - KUMURKEK	Rp 12.230.000	Rp 11.120.000	Rp 5.130.000	Rp 4.690.000	Rp 4.460.000	Rp 5.259.000

	WILAYAH DOOMBERAY RAYA						
12	KABUPATEN FAKFAK - FAKFAK	Rp 12.560.000	Rp 10.030.000	Rp 5.140.000	Rp 4.720.000	Rp 4.430.000	Rp 6.200.000
13	KABUPATEN KAIMANA. - KAIMANA	Rp 10.110.000	Rp 8.710.000	Rp 4.280.000	Rp 3.540.000	Rp 3.350.000	Rp 4.320.000

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196508181992031022

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA (HSTPRN)

No	KABUPATEN / KOTA	PEMBANGUNAN										
		RUMAH NEGARA								PAGAR RUMAH NEGARA PER METER		
		TYPE A = 250 M2 PER M2	TYPE A = 250 M2 PER UNIT	TYPE B = 120 M2 PER M2	TYPE B = 120 M2 PER UNIT	TYPE C = 70 M2 TYPE D = 60 M2 TYPE E = 36 M2	TYPE C = 70 M2 PER UNIT	TYPE D = 60 M2 PER UNIT	TYPE E = 36 M2 PER UNIT	DEPAN (M')	BELAKANG (M')	SAMPING (M')
	WILAYAH MANOKWARI RAYA											
1	KABUPATEN MANOKWARI - MANOKWARI	Rp 9.412.000	Rp 2.353.000.000	Rp 9.316.600	Rp 1.117.992.000	Rp 6.263.500	Rp 438.445.000	Rp 313.175.000	Rp 225.486.000	Rp 3.610.000	Rp 2.020.000	Rp 1.880.000
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - RANSIKI	Rp 8.950.000	Rp 2.237.500.000	Rp 9.010.000	Rp 1.081.200.000	Rp 6.761.400	Rp 473.298.000	Rp 338.070.000	Rp 243.410.400	Rp 3.670.000	Rp 1.960.000	Rp 1.830.000
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - BINTUNI	Rp 10.990.000	Rp 2.747.500.000	Rp 11.030.000	Rp 1.323.600.000	Rp 7.830.000	Rp 548.100.000	Rp 391.500.000	Rp 281.680.000	Rp 4.450.000	Rp 2.910.000	Rp 2.690.000
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - RASIEI	Rp 9.770.000	Rp 2.442.500.000	Rp 9.810.000	Rp 1.177.200.000	Rp 6.930.000	Rp 485.100.000	Rp 348.500.000	Rp 249.480.000	Rp 3.940.000	Rp 2.440.000	Rp 2.290.000
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - ANGGI	Rp 14.112.000	Rp 3.528.000.000	Rp 13.520.000	Rp 1.622.400.000	Rp 10.875.000	Rp 761.250.000	Rp 543.750.000	Rp 391.500.000	Rp 5.180.000	Rp 3.900.000	Rp 3.560.000
	WILAYAH SORONG RAYA											
6	KOTA SORONG - SORONG	Rp 9.130.000	Rp 2.282.500.000	Rp 9.110.000	Rp 1.093.200.000	Rp 6.028.500	Rp 421.995.000	Rp 301.425.000	Rp 217.026.000	Rp 3.510.000	Rp 1.870.000	Rp 1.760.000
7	KABUPATEN SORONG - AIMAS	Rp 9.570.000	Rp 2.392.500.000	Rp 9.740.000	Rp 1.168.800.000	Rp 6.365.000	Rp 445.550.000	Rp 318.250.000	Rp 229.140.000	Rp 3.850.000	Rp 2.040.000	Rp 1.900.000
8	KABUPATEN SORONG SELATAN - TEMINABUAN	Rp 11.600.000	Rp 2.900.000.000	Rp 11.820.000	Rp 1.418.400.000	Rp 7.690.000	Rp 538.300.000	Rp 384.500.000	Rp 276.840.000	Rp 4.490.000	Rp 2.900.000	Rp 2.750.000
9	KABUPATEN RAJA AMPAT - WAISAI	Rp 10.440.000	Rp 2.610.000.000	Rp 10.540.000	Rp 1.264.800.000	Rp 6.870.000	Rp 480.900.000	Rp 343.500.000	Rp 247.320.000	Rp 4.070.000	Rp 2.450.000	Rp 2.310.000
10	KABUPATEN TAMBRAUW - FEEF	Rp 10.470.000	Rp 2.617.500.000	Rp 10.680.000	Rp 1.281.600.000	Rp 7.042.000	Rp 492.940.000	Rp 352.100.000	Rp 253.512.000	Rp 3.970.000	Rp 2.320.000	Rp 2.140.000
11	KABUPATEN MAYBRAT - KUMURKEK	Rp 12.260.000	Rp 3.065.000.000	Rp 12.560.000	Rp 1.507.200.000	Rp 8.040.000	Rp 562.800.000	Rp 402.000.000	Rp 289.440.000	Rp 4.600.000	Rp 3.080.000	Rp 2.890.000
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA											
12	KABUPATEN FAKFAK - FAKFAK	Rp 11.850.000	Rp 2.962.500.000	Rp 11.950.000	Rp 1.434.000.000	Rp 8.140.000	Rp 569.800.000	Rp 407.000.000	Rp 293.040.000	Rp 4.640.000	Rp 3.150.000	Rp 2.890.000
13	KABUPATEN KAIMANA - KAIMANA	Rp 10.060.000	Rp 2.515.000.000	Rp 10.360.000	Rp 1.243.200.000	Rp 7.142.800	Rp 499.996.000	Rp 357.140.000	Rp 257.140.800	Rp 3.950.000	Rp 2.280.000	Rp 2.130.000

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM
Dr. Robert R.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196508181992031022

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

HARGA SATUAN TERTINGGI RUMAH LAYAK HUNI (RLH) OAP

No	KABUPATEN / KOTA	P E M B A N G U N A N	
		RUMAH LAYAK HUNI (RLH) OAP TYPE 45 PER M2	RUMAH LAYAK HUNI (RLH) OAP TYPE 45 PER UNIT
	WILAYAH MANOKWARI RAYA		
1	KABUPATEN MANOKWARI - MANOKWARI	Rp 6.263.500	Rp 281.857.500
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - RANSIKI	Rp 6.761.400	Rp 304.263.000
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - BINTUNI	Rp 7.830.000	Rp 352.350.000
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - RASIEI	Rp 6.930.000	Rp 311.850.000
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - ANGGI	Rp 10.875.000	Rp 489.375.000
	WILAYAH SORONG RAYA		
6	KOTA SORONG - SORONG	Rp 6.028.500	Rp 271.282.500
7	KABUPATEN SORONG - AIMAS	Rp 6.365.000	Rp 286.425.000
8	KABUPATEN SORONG SELATAN - TEMINABUAN	Rp 7.690.000	Rp 346.050.000
9	KABUPATEN RAJA AMPAT - WAISAI	Rp 6.870.000	Rp 309.150.000
10	KABUPATEN TAMBRAUW - FEEF	Rp 7.042.000	Rp 316.890.000
11	KABUPATEN MAYBRAT - KUMURKEK	Rp 8.040.000	Rp 361.800.000
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA		
12	KABUPATEN FAKFAK - FAKFAK	Rp 8.140.000	Rp 366.300.000
13	KABUPATEN KAIMANA - KAIMANA	Rp 7.142.800	Rp 321.426.000

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196508181992031022

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

HARGA SATUAN TERTINGGI PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

NO	KABUPATEN / KOTA	PEMELIHARAAN RUTIN PER TAHUN									
		BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2		RUMAH NEGARA PER UNIT					PAGAR GEDUNG NEGARA (M')	PAGAR RUMAH NEGARA (M')	
		TIDAK SEDERHANA (M2)	SEDERHANA (M2)	TYPE A = 250 M2	TYPE B = 120 M2	TYPE C = 70 M2	TYPE D = 50 M2	TYPE E = 36 M2			
	WILAYAH MANOKWARI RAYA										
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp 187.100	Rp 165.720	Rp 47.060.000	Rp 186.332	Rp 8.768.900	Rp 6.263.500	Rp 4.509.720	Rp 78.400	Rp 72.200	
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp 180.600	Rp 164.220	Rp 44.750.000	Rp 180.200	Rp 9.465.960	Rp 6.761.400	Rp 4.868.208	Rp 78.400	Rp 73.400	
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp 230.800	Rp 198.200	Rp 54.950.000	Rp 220.600	Rp 10.962.000	Rp 7.830.000	Rp 5.637.600	Rp 99.400	Rp 89.000	
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp 205.400	Rp 175.000	Rp 48.850.000	Rp 196.200	Rp 9.702.000	Rp 6.930.000	Rp 4.989.600	Rp 86.800	Rp 78.800	
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA	Rp 282.200	Rp 227.800	Rp 70.560.000	Rp 270.400	Rp 15.225.000	Rp 10.875.000	Rp 7.830.000	Rp 117.400	Rp 103.600	
	WILAYAH SORONG RAYA										
6	KOTA SORONG	Rp 180.000	Rp 157.000	Rp 45.650.000	Rp 182.200	Rp 8.439.900	Rp 6.028.500	Rp 4.340.520	Rp 76.400	Rp 70.200	
7	KABUPATEN SORONG	Rp 184.000	Rp 166.000	Rp 47.850.000	Rp 194.800	Rp 8.911.000	Rp 6.365.000	Rp 4.582.800	Rp 84.200	Rp 77.000	
8	KABUPATEN SOSORNG SELATAN	Rp 244.600	Rp 206.000	Rp 58.000.000	Rp 236.400	Rp 10.766.000	Rp 7.690.000	Rp 5.536.800	Rp 100.800	Rp 89.800	
9	KABUPATEN RAJA AMPAT	Rp 196.600	Rp 184.200	Rp 52.200.000	Rp 210.800	Rp 9.618.000	Rp 6.870.000	Rp 4.946.400	Rp 87.800	Rp 81.400	
10	KABUPATEN TAMBRAUW	Rp 196.400	Rp 189.400	Rp 52.350.000	Rp 213.600	Rp 9.858.800	Rp 7.042.000	Rp 5.070.240	Rp 85.800	Rp 79.400	
11	KABUPATEN MAYBRAT	Rp 244.600	Rp 222.400	Rp 61.300.000	Rp 251.200	Rp 11.256.000	Rp 8.040.000	Rp 5.788.800	Rp 102.600	Rp 92.000	
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA										
12	KABUPATEN FAKFAK	Rp 251.200	Rp 200.600	Rp 59.250.000	Rp 239.000	Rp 11.396.000	Rp 8.140.000	Rp 5.860.800	Rp 102.800	Rp 92.800	
13	KABUPATEN KAJMANA	Rp 202.200	Rp 174.200	Rp 50.300.000	Rp 207.200	Rp 9.999.920	Rp 7.142.800	Rp 5.142.816	Rp 85.600	Rp 79.000	

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
 TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

HARGA SATUAN TERTINGGI PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA - RUMAH NEGARA

No	KABUPATEN / KOTA	PERAWATAN RINGAN (MAX KERUSAKAN 35%)						
		BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2		RUMAH NEGARA PER UNIT				
		TIDAK SEDERHANA (M2)	SEDERHANA (M2)	TYPE A = 250 M2	TYPE B = 120 M2	TYPE C = 70 M2	TYPE D = 50 M2	TYPE E = 36 M2
	WILAYAH MANOKWARI RAYA							
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp 3.274.250	Rp 2.900.100	Rp 823.550.000	Rp 391.297.200	Rp 153.455.750	Rp 109.611.250	Rp 78.920.100
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp 3.160.500	Rp 2.873.850	Rp 783.125.000	Rp 378.420.000	Rp 165.654.300	Rp 118.324.500	Rp 85.193.640
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp 4.039.000	Rp 3.468.500	Rp 961.625.000	Rp 463.260.000	Rp 191.835.000	Rp 137.025.000	Rp 98.658.000
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp 3.594.500	Rp 3.062.500	Rp 854.875.000	Rp 412.020.000	Rp 169.785.000	Rp 121.275.000	Rp 87.318.000
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA	Rp 4.938.500	Rp 3.986.500	Rp 1.234.800.000	Rp 567.840.000	Rp 266.437.500	Rp 190.312.500	Rp 137.025.000
	WILAYAH SORONG RAYA							
6	KOTA SORONG - IBUKOTA	Rp 3.150.000	Rp 2.747.500	Rp 798.875.000	Rp 382.620.000	Rp 147.698.250	Rp 105.498.750	Rp 75.959.100
7	KABUPATEN SORONG - IBUKOTA	Rp 3.220.000	Rp 2.905.000	Rp 837.375.000	Rp 409.080.000	Rp 155.942.500	Rp 111.387.500	Rp 80.199.000
8	KABUPATEN SORONG SELATAN - IBUKOTA	Rp 4.280.500	Rp 3.605.000	Rp 1.015.000.000	Rp 496.440.000	Rp 188.405.000	Rp 134.575.000	Rp 96.894.000
9	KABUPATEN RAJA AMPAT - IBUKOTA	Rp 3.440.500	Rp 3.223.500	Rp 913.500.000	Rp 442.680.000	Rp 168.315.000	Rp 120.225.000	Rp 86.562.000
10	KABUPATEN TAMBRAUW - IBUKOTA	Rp 3.437.000	Rp 3.314.500	Rp 916.125.000	Rp 448.560.000	Rp 172.529.000	Rp 123.235.000	Rp 88.729.200
11	KABUPATEN MAYBRAT - IBUKOTA	Rp 4.280.500	Rp 3.892.000	Rp 1.072.750.000	Rp 527.520.000	Rp 196.980.000	Rp 140.700.000	Rp 101.304.000
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA							
12	KABUPATEN FAKFAK - IBUKOTA	Rp 4.396.000	Rp 3.510.500	Rp 1.036.875.000	Rp 501.900.000	Rp 199.430.000	Rp 142.450.000	Rp 102.564.000
13	KABUPATEN KAIMANA. - IBUKOTA	Rp 3.538.500	Rp 3.048.500	Rp 880.250.000	Rp 435.120.000	Rp 174.998.600	Rp 124.999.000	Rp 89.999.280

No	KABUPATEN / KOTA	PERAWATAN SEDANG (MAX KERUSAKAN 45%)						
		BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2		RUMAH NEGARA PER UNIT				
		TIDAK SEDERHANA (M2)	SEDERHANA (M2)	TYPE A = 250 M2	TYPE B = 120 M2	TYPE C = 70 M2	TYPE D = 50 M2	TYPE E = 36 M2
	WILAYAH MANOKWARI RAYA							
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp 4.209.750	Rp 3.728.700	Rp 1.058.850.000	Rp 503.096.400	Rp 153.455.750	Rp 109.611.250	Rp 78.920.100
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp 4.063.500	Rp 3.694.950	Rp 1.006.875.000	Rp 486.540.000	Rp 165.654.300	Rp 118.324.500	Rp 85.193.640
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp 5.193.000	Rp 4.459.500	Rp 1.236.375.000	Rp 595.620.000	Rp 191.835.000	Rp 137.025.000	Rp 98.658.000
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp 4.621.500	Rp 3.937.500	Rp 1.099.125.000	Rp 529.740.000	Rp 169.785.000	Rp 121.275.000	Rp 87.318.000
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA	Rp 6.349.500	Rp 5.125.500	Rp 1.587.600.000	Rp 730.080.000	Rp 266.437.500	Rp 190.312.500	Rp 137.025.000
	WILAYAH SORONG RAYA							
6	KOTA SORONG - IBUKOTA	Rp 4.050.000	Rp 3.532.500	Rp 1.027.125.000	Rp 491.940.000	Rp 147.698.250	Rp 105.498.750	Rp 75.959.100
7	KABUPATEN SORONG - IBUKOTA	Rp 4.140.000	Rp 3.735.000	Rp 1.076.625.000	Rp 525.960.000	Rp 155.942.500	Rp 111.387.500	Rp 80.199.000
8	KABUPATEN SORONG SELATAN - IBUKOTA	Rp 5.503.500	Rp 4.635.000	Rp 1.305.000.000	Rp 638.280.000	Rp 188.405.000	Rp 134.575.000	Rp 96.894.000
9	KABUPATEN RAJA AMPAT - IBUKOTA	Rp 4.423.500	Rp 4.144.500	Rp 1.174.500.000	Rp 569.160.000	Rp 168.315.000	Rp 120.225.000	Rp 86.562.000
10	KABUPATEN TAMBRAUW - IBUKOTA	Rp 4.419.000	Rp 4.261.500	Rp 1.177.875.000	Rp 576.720.000	Rp 172.529.000	Rp 123.235.000	Rp 88.729.200
11	KABUPATEN MAYBRAT - IBUKOTA	Rp 5.503.500	Rp 5.004.000	Rp 1.379.250.000	Rp 678.240.000	Rp 196.980.000	Rp 140.700.000	Rp 101.304.000
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA							
12	KABUPATEN FAKFAK - IBUKOTA	Rp 5.652.000	Rp 4.513.500	Rp 1.333.125.000	Rp 645.300.000	Rp 199.430.000	Rp 142.450.000	Rp 102.564.000
13	KABUPATEN KAIMANA. - IBUKOTA	Rp 4.549.500	Rp 3.919.500	Rp 1.131.750.000	Rp 559.440.000	Rp 174.998.600	Rp 124.999.000	Rp 89.999.280

No	KABUPATEN / KOTA	PERAWATAN BERAT (MAX KERUSAKAN 65%)							
		BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2		RUMAH NEGARA PER UNIT					
		TIDAK SEDERHANA (M2)	SEDERHANA (M2)	TYPE A = 250 M2	TYPE B = 120 M2	TYPE C = 70 M2	TYPE D = 50 M2	TYPE E = 36 M2	
	WILAYAH MANOKWARI RAYA								
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp 6.080.750	Rp 5.385.900	Rp 1.529.450.000	Rp 726.694.800	Rp 284.989.250	Rp 203.563.750	Rp 146.565.900	
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp 5.869.500	Rp 5.337.150	Rp 1.454.375.000	Rp 702.780.000	Rp 307.643.700	Rp 219.745.500	Rp 158.216.760	
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp 7.501.000	Rp 6.441.500	Rp 1.785.875.000	Rp 860.340.000	Rp 356.265.000	Rp 254.475.000	Rp 183.222.000	
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp 6.675.500	Rp 5.687.500	Rp 1.587.625.000	Rp 765.180.000	Rp 315.315.000	Rp 225.225.000	Rp 162.162.000	
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA	Rp 9.171.500	Rp 7.403.500	Rp 2.293.200.000	Rp 1.054.560.000	Rp 494.812.500	Rp 353.437.500	Rp 254.475.000	
	WILAYAH SORONG RAYA								
6	KOTA SORONG - IBUKOTA	Rp 5.850.000	Rp 5.102.500	Rp 1.483.625.000	Rp 710.580.000	Rp 274.296.750	Rp 195.926.250	Rp 141.066.900	
7	KABUPATEN SORONG - IBUKOTA	Rp 5.980.000	Rp 5.395.000	Rp 1.555.125.000	Rp 759.720.000	Rp 289.607.500	Rp 206.862.500	Rp 148.941.000	
8	KABUPATEN SORONG SELATAN - IBUKOTA	Rp 7.949.500	Rp 6.695.000	Rp 1.885.000.000	Rp 921.960.000	Rp 349.895.000	Rp 249.925.000	Rp 179.946.000	
9	KABUPATEN RAJA AMPAT - IBUKOTA	Rp 6.389.500	Rp 5.986.500	Rp 1.696.500.000	Rp 822.120.000	Rp 312.585.000	Rp 223.275.000	Rp 160.758.000	
10	KABUPATEN TAMBRAUW - IBUKOTA	Rp 6.383.000	Rp 6.155.500	Rp 1.701.375.000	Rp 833.040.000	Rp 320.411.000	Rp 228.865.000	Rp 164.782.800	
11	KABUPATEN MAYBRAT - IBUKOTA	Rp 7.949.500	Rp 7.228.000	Rp 1.992.250.000	Rp 979.680.000	Rp 365.820.000	Rp 261.300.000	Rp 188.136.000	
	WILAYAH DOOMBERAY RAYA								
12	KABUPATEN FAKFAK - IBUKOTA	Rp 8.164.000	Rp 6.519.500	Rp 1.925.625.000	Rp 932.100.000	Rp 370.370.000	Rp 264.550.000	Rp 190.476.000	
13	KABUPATEN KAIMANA. - IBUKOTA	Rp 6.571.500	Rp 5.661.500	Rp 1.634.750.000	Rp 808.080.000	Rp 324.997.400	Rp 232.141.000	Rp 167.141.520	

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196508181992031022

PERSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA

KLASIFIKASI BANGUNAN SEDERHANA

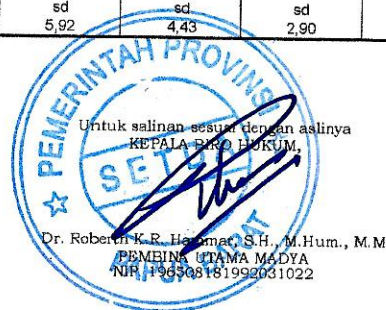
BIAYA KONSTRUKSI FISIK (Juta Rp)	0	250	500	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000	500.000
KOMPONEN BIAYA	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	18,11	18,11 sd	15,03 sd	12,39 sd	10,10 sd	8,00 sd	6,30 sd	4,80 sd	3,70 sd	2,80 sd	2,08 sd	1,80 sd
2. PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	12,40	12,40 sd	9,80 sd	7,72 sd	6,30 sd	5,10 sd	4,00 sd	3,10 sd	2,40 sd	1,90 sd	1,50 sd	1,36 sd
3. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	14,60	14,60 sd	10,47 sd	7,07 sd	4,40 sd	2,97 sd	1,98 sd	1,25 sd	0,83 sd	0,56 sd	0,37 sd	0,26 sd

KLASIFIKASI BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (Juta Rp)	0	250	500	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000	500.000
KOMPONEN BIAYA	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	19,80	19,80 sd	16,40 sd	13,50 sd	11,10 sd	9,10 sd	7,30 sd	5,80 sd	4,60 sd	3,64 sd	3,80 sd	2,32 sd
2. MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %)	18,35	18,35 sd	15,19 sd	12,50 sd	10,28 sd	8,30 sd	6,76 sd	5,37 sd	4,26 sd	3,37 sd	2,59 sd	2,15 sd
3. PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	14,20	14,20 sd	11,75 sd	9,67 sd	7,95 sd	6,52 sd	5,23 sd	4,15 sd	3,29 sd	2,60 sd	2,00 sd	1,66 sd
4. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	16,00	16,00 sd	11,25 sd	8,21 sd	5,92 sd	4,43 sd	2,90 sd	1,92 sd	1,26 sd	0,72 sd	0,42 sd	0,28 sd

KLASIFIKASI KHUSUS

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (Juta Rp)	0	250	500	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000	500.000
KOMPONEN BIAYA	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd	sd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	22,00	22,00 sd	18,20 sd	15,16 sd	12,50 sd	10,24 sd	8,20 sd	6,50 sd	5,10 sd	4,00 sd	3,15 sd	2,75 sd
2. MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %)	19,80	19,80 sd	16,50 sd	13,60 sd	11,20 sd	9,10 sd	7,20 sd	5,60 sd	4,30 sd	3,30 sd	2,60 sd	2,30 sd
3. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	16,00	16,00 sd	11,25 sd	8,21 sd	5,92 sd	4,43 sd	2,90 sd	1,92 sd	1,26 sd	0,72 sd	0,42 sd	0,28 sd



GUBERNUR PAPUA BARAT,

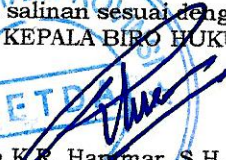
CAO/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

No	KABUPATEN / KOTA	PENGEMBANGAN PERPIPAAN PER 1 M'	PEMBANGUNAN RESERVOIR 9 M3	PEMBANGUNAN BRONGKAPTERING 8,5 M3
WILAYAH MANOKWARI RAYA				
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp 448.081	Rp 329.144.809	Rp 36.373.187
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp 447.830	Rp 324.260.942	Rp 36.167.135
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp 448.363	Rp 335.105.461	Rp 36.581.444
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp 448.242	Rp 330.563.848	Rp 36.431.341
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA	Rp 448.629	Rp 336.430.875	Rp 36.703.772
WILAYAH SORONG RAYA				
6	KOTA SORONG	Rp 447.902	Rp 326.349.280	Rp 36.212.035
7	KABUPATEN SORONG	Rp 446.181	Rp 310.140.778	Rp 34.404.511
8	KABUPATEN SORONG SELATAN	Rp 448.637	Rp 339.208.713	Rp 36.797.760
9	KABUPATEN RAJA AMPAT	Rp 447.990	Rp 326.625.351	Rp 36.318.745
10	KABUPATEN TAMBRAUW	Rp 447.927	Rp 325.019.128	Rp 36.285.555
11	KABUPATEN MAYBRAT	Rp 448.664	Rp 339.501.955	Rp 36.844.713
WILAYAH DOOMBERAY RAYA				
12	KABUPATEN FAKFAK	Rp 448.629	Rp 336.430.875	Rp 36.703.772
13	KABUPATEN KAIMANA	Rp 447.602	Rp 320.563.564	Rp 36.118.219

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196508181992031022

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

PEKERJAAN JALAN JEMBATAN

NO	PEKERJAAN	SATUAN	MANOKWARI RAYA
1	Pembangunan Jalan - TIMBUNAN PILIHAN	KM	Rp 3.000.000.000
2	Rekonstruksi Jalan - LAPEN	KM	Rp 3.500.000.000
3	Rekonstruksi Jalan - HRS	KM	Rp 5.000.000.000
4	Rekonstruksi Jalan - RIGID	KM	Rp 8.000.000.000
5	Rehabilitasi Jalan - AC / WC	KM	Rp 2.500.000.000
6	Pembangunan Box Culvert	UNIT	Rp 1.000.000.000
7	Pembangunan Plat Dekker	UNIT	Rp 500.000.000
8	Pembangunan Jembatan - BALOK T - SUMURAN	M'	Rp 275.000.000
9	Pembangunan Jembatan - BALOK T - PANCANG	M'	Rp 300.000.000
10	Pembangunan Jembatan - GIRDER BAJA - SUMURAN	M'	Rp 325.000.000
11	Pembangunan Jembatan - RANGKA BAJA - SUMURAN	M'	Rp 350.000.000
12	Pembangunan Jembatan - GIRDER BAJA - PANCANG	M'	Rp 350.000.000
13	Pembangunan Jembatan - RANGKA BAJA - PANCANG	M'	Rp 400.000.000
14	Pemeliharaan Berkala Jalan - PEMBERSIHAN / PENGECORAN BAHU JALAN	M'	Rp 2.000.000

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

 Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 196508181992031022

GUBERNUR PAPUA BARAT,
 CAP/TTD
 DOMINGGUS MANDACAN

LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
 TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

PEKERJAAN BANGUNAN IRIGASI , NORMALISASI SUNGAI DAN PENGAMAN ABRASI PANTAI

No	KABUPATEN / KOTA	BANGUNAN IRIGASI							NORMALISASI SUNGAI		
		BENDUNG		SALURAN PRIMER		SALURAN SEKUNDER		JALAN INSPEKSI (m')	JENIS KONSTRUKSI		BRONJONG (m')
		FREE INTAKE (buah)	BENDUNG (buah)	PAS. BATU (m')	PRECAST/BETON (m')	PAS. BATU (m')	PRECAST/BETON (m')		PAS. BATU (m')	KONSTRUKSI BETON (m')	
	WILAYAH MANOKWARI RAYA										
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp 20.000.000.000	Rp 34.500.000.000	Rp 3.277.500	Rp 3.450.000	Rp 2.645.000	Rp 2.875.000	Rp 2.472.501	Rp 17.035.640	-	Rp 11.553.618
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	-	-	-	-	-	-	-	Rp 17.035.870	-	Rp 11.553.618
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	Rp 20.000.000.000	Rp 34.500.000.000	-	Rp 4.025.000	-	Rp 3.220.000	Rp 2.570.250	-	Rp 15.386.052	-
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	-	-	-	-	-	-	-	Rp 17.035.640	-	Rp 11.553.618
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA	-	-	-	-	-	-	-	Rp 17.035.640	-	Rp 11.553.618
	WILAYAH SORONG RAYA										
6	KOTA SORONG	-	-	-	-	-	-	-	Rp 18.179.500	-	Rp 16.150.000
7	KABUPATEN SORONG	Rp 21.000.000.000	Rp 35.500.000.000	Rp 3.565.000	Rp 4.082.500	Rp 3.105.000	Rp 3.450.000	Rp 2.530.000	Rp 18.241.600	-	Rp 16.540.000
8	KABUPATEN SORONG SELATAN	Rp 25.000.000.000	Rp 38.500.000.000	Rp 4.600.000	Rp 5.750.000	Rp 3.450.000	Rp 4.025.000	Rp 3.220.000	Rp 20.930.000	-	Rp 17.100.000
9	KABUPATEN RAJA AMPAT	-	-	-	-	-	-	-	Rp 19.200.000	-	Rp 17.700.000
10	KABUPATEN TAMBRAUW	-	-	-	-	-	-	-	Rp 17.000.000	-	Rp 15.500.000
11	KABUPATEN MAYBRAT	-	-	-	-	-	-	-	Rp 21.112.000	-	Rp 18.200.000
	WILAYAH BOMBERAY RAYA										
12	KABUPATEN FAKFAK	Rp 40.000.000.000	Rp 70.000.000.000	Rp 5.270.000	Rp 8.000.000	Rp 4.030.000	Rp 6.032.000	Rp 3.540.000	Rp 16.800.000	-	Rp 15.780.000
13	KABUPATEN KAIMANA	-	-	-	-	-	-	-	Rp 16.230.000	-	Rp 15.220.000

No	KABUPATEN / KOTA	PENGAMAN ABRASI PANTAI			PEMELIHARAAN IRIGASI		PEMELIHARAAN NORMALISASI		PEMELIHARAAN ABRASI PANTAI	
		BREAK WATER (KUBUS BETON) (m')	REVETMENT (m')	TALUD (PAS. BATU) (m')	RUTIN (m')	BERKALA (m')	RUTIN (m')	BERKALA (m')	RUTIN (m')	BERKALA (m')
	WILAYAH MANOKWARI RAYA									
1	KABUPATEN MANOKWARI - IBUKOTA	Rp 25.110.000	Rp 25.090.000	Rp 12.558.368	Rp 2.123.030	Rp 4.070.312	-	Rp 7.170.321	-	Rp 2.294.018
2	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - IBUKOTA	Rp 25.231.000	Rp 25.131.000	Rp 12.581.632	-	-	-	Rp 7.500.762	-	Rp 2.486.128
3	KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA	-	-	-	Rp 4.121.200	Rp 6.113.015	-	Rp 11.030.378	-	-
4	KABUPATEN TELUK WONDAMA - IBUKOTA	Rp 25.412.000	Rp 25.213.000	Rp 12.635.796	-	-	-	Rp 11.060.339	-	Rp 2.843.096
5	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK - IBUKOTA	-	-	-	-	-	-	Rp 13.200.241	-	-
	WILAYAH SORONG RAYA									
6	KOTA SORONG	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000	Rp 17.000.000	-	-	-	Rp 7.170.321	-	Rp 2.294.018
7	KABUPATEN SORONG	Rp 27.330.000	Rp 27.330.000	Rp 17.330.000	Rp 2.123.030	Rp 4.500.312	-	Rp 7.500.762	-	Rp 2.294.018
8	KABUPATEN SORONG SELATAN	-	-	-	Rp 2.123.030	Rp 4.500.312	-	Rp 11.030.378	-	-
9	KABUPATEN RAJA AMPAT	Rp 28.420.000	Rp 28.420.000	Rp 18.420.000	-	-	-	Rp 11.060.339	-	Rp 2.294.018
10	KABUPATEN TAMBRAUW	Rp 28.420.000	Rp 28.420.000	Rp 18.420.000	-	-	-	Rp 13.200.241	-	Rp 2.294.018
11	KABUPATEN MAYBRAT	-	-	-	-	-	-	Rp 13.200.241	-	-
	WILAYAH BOMBERAY RAYA									
12	KABUPATEN FAKFAK	Rp 27.850.000	Rp 28.200.000	Rp 17.360.000	Rp 2.123.030	Rp 4.500.312	-	Rp 8.720.762	-	Rp 3.544.018
13	KABUPATEN KAIMANA	Rp 27.500.000	Rp 27.430.000	Rp 16.430.000	-	-	-	Rp 7.500.762	-	Rp 2.294.018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
 TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Pembuatan Lubang Tanam dan Penanaman)	Ha	2.500.000,-	
2	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Persiapan Lahan Komoditas Tanaman Pangan)	Ha	2.000.000,-	
3	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Pemeliharaan Komoditas Tanaman Pangan)	Ha	3.000.000,-	
4	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Persiapan Lahan Komoditas Hortikultura)	Ha	2.000.000,-	
5	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Pemeliharaan Komoditas Hortikultura)	Ha	3.000.000,-	
6	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Persiapan Lahan Komoditas Perkebunan)	Ha	2.500.000,-	
7	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Biaya Pembuatan Lubang Tanam dan Penanaman Komoditas perkebunan)	Ha	4.000.000,-	
8	Honorarium Tenaga Borongan Lepas (Optimalisasi Lahan Padi/Jagung/Kedelai)	Ha	3.750.000,-	

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN

No	Kegiatan	Unit	Volume	Harga Satuan
1	Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan (uk. 75x75 cm) (buah)			
	Harga per- Buah	Buah	1	1.352.606,8
2	Pengadaan & Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan (uk. 90x90 cm) (buah)			
	Harga per- Buah	Buah	1	1.887.743,14
3	Pengadaan & Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (uk. 120x180 cm) (buah)			
	Harga per- Buah	Buah	1	12.324.615,74
4	Pengadaan & Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (uk. 120x240 cm) (buah)			
	Harga per- Buah	Buah	1	14.255.859,00
5	Pengadaan & Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan Portal Bentang 18 m (buah)			
	Harga per- Buah	Buah	1	120.610.034,48
6	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (4 m) Type 1 : Terminal End Masuk ke Dalam Tanah			
	Harga per- Buah	Buah	1	8.880.853,09
7	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Dengan Rambu Chevron) Type 1 : Terminal End Masuk ke Dalam Tanah			
	Harga per- Buah	Buah	1	11.188.164,56
8	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (4 m) Type 2: Terminal End Lengkung			
	Harga per- Buah	Buah	1	6.251.838,61
9	Pengadaan & Pemasangan Marka Jalan (uk. 3x120 mm) (Thermoplastic)			
	Harga per- Buah	Buah	1	3.187.436,00
10	Pengadaan & Pemasangan Marka Jalan (uk. 3x120 mm) (Coldplastic)			
	Harga per- Buah	Buah	1	34,4985
11	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan (uk. 10x10x2 cm)			
	Harga per- Buah	Buah	1	260,2407

No	Kegiatan	Unit	Volume	Harga Satuan
12	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan (uk. 10x15x2)			
	Harga per- Buah	Buah	1	267,9447
13	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan Bulat (tempered)			
	Harga per- Buah	Buah	1	278,0851
14	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan Tenaga Surya (Solar Cell)			
	Harga per- Buah	Buah	1	542,5827
15	Pengadaan & Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light)			
	Harga per- Buah	Buah	1	52.403.274,14
16	Pengadaan & Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar Cell) Tiang Lurus			
	Harga per- Buah	Buah	1	32.975.876,76
17	Pengadaan & Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar Cell) Tiang Lengkung			
	Harga per- Buah	Buah	1	39.225.876,76
18	Pengadaan & Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas 3 (Tiga) Persimpangan			
	Harga per- Buah	Buah	1	168.600.449,16
19	Pengadaan & Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas 4 (Empat) Persimpangan			
	Harga per- Buah	Buah	1	195.318.322,44
20	Pengadaan & Pemasangan Patok Tikungan Pipa Plastik			
	Harga per- Buah	Buah	1	750,8853
21	Pengadaan & Pemasangan Patok Tikungan Pipa Besi			
	Harga per- Buah	Buah	1	595,8853
22	Pengadaan & Pemasangan Cermin Tikungan			
	Harga per- Buah	Buah	1	4.926.332,34
23	Pengadaan & Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas Tenaga Surya			
	Harga per- Buah	Buah	1	378.732.475,95
24	Pengadaan & Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas Tenaga Surya Simpang 3			
	Harga per- Buah	Buah	1	358.094.745,95

No	Kegiatan	Unit	Volume	Harga Satuan
25	Pengadaan & Pemasangan LPJU Konvensional			
	Harga per- Buah	Buah	1	15.045.605,14
26	Pengadaan & Pemasangan LPJU Solar Cell			
	Harga per- Buah	Buah	1	34.887.489,68
27	Pengadaan & Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Dengan Rambu Chevron) Type 2 : Terminal End Lengkung			
	Harga per- Buah	Buah	1	10.061.216,76

GOVERNOR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN XII PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

ASDP DAN KEPELABUHANAN

No	Kegiatan	Unit	Volume	Harga Satuan
ASDP				
1	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Pekerjaan Persiapan	Paket	1	1.400.802.029,44
2	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Konstruksi Causeway (108.72 M2)	M2	1	592.031.298,75
3	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Trestle (432,25 M2)	M2	1	3.799.536.297,11
4	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Dudukan Trestle / Abutment	Buah	1	514.996.032
5	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Dudukan Moveable Bridge	Buah	1	2.295.926.887
6	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Mooring Dolphin	Buah	1	2.844.706.987
7	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Breasting Dolphin	Buah	1	13.967.451.492
8	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Konstruksi Dudukan Hidrolik	Buah	1	2.281.134.562
9	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Konstruksi Pelindung MB	Buah	1	1.459.428.586
10	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Catwalk	m2	1	524.912.950
11	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Konstruksi Dudukan dan Ruang Kontrol	Buah	1	230.479.221
12	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Rumah Kontrol	M2	1	110.890.713
13	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Pembuatan Jalan dan Lapangan Penetrasi Dengan Kolakan (L=2.150 M2, TEBAL = 7 CM)	M2	1	130.815.489
14	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Pembangunan Moveable Bridge	M2	1	5.022.656.083
15	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Hidrolik	Paket	1	6.192.061.431
16	Pembangunan Dermaga Penyeberangan : Lampu Penerangan	Paket	1	325.665.200
Kepelabuhanan				
17	Pembangunan Causeway (100 m x 5 m) t : 3m	m2	1	5.935.476,00
18	Pembangunan Talud (t=2 m) (5 m')	m'	1	10.887.348,00
19	Pembangunan Talud (t=2,1 m sd 3,5 m) (5 m')	m'	1	17.317.458,00
20	Pembangunan Talud (t=3,6 m sd 5 m) (5 m')	m'	1	29.660.262,00
21	Pengaspalan Lapangan Parkir (30 m x 25 m)	m2	1	1.808.821,00
22	Pengaspalan Lapangan Penumpukan (30 m x 25 m)	m2	1	1.703.764,00
23	Pengaspalan Jalan Pelabuhan (100 m x 5 m)	m2	1	1.840.240,00

24	Pembangunan Dermaga Beton Tiang Pipa Baja 480 m2 , (P = 60 M' , L = 8M)	m2	1	17.766.630,00
25	Pembangunan Dermaga Beton Tiang Pipa Beton 480 m2 , (P = 60 M' , L = 8M)	m2	1	12.866.971,00
26	Pembangunan Trestle Beton Tiang Pipa Baja 480 m2 , (P = 60 M' , L = 8M)	m2	1	16.236.842,00
27	Pembangunan Trestle Beton Tiang Pipa Beton 480 m2 , (P = 60 M' , L = 8M)	m2	1	11.593.370,00
28	Pengerukan dengan Kapal Non Hopper - Karang (95.040 m3)	m3	1	320.932,00
29	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2000 (Jarak DA ≤ 6 Nmil) Kap. Produksi =4.016 m3/hari	m3	1	54.600,00
30	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2000 (Jarak 6 < DA ≤ 12 Nmil) Kap.Produksi = 3,264	m3	1	67,20
31	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2000 (Jarak 12 < DA ≤ 16 Nmil) Kap.Produksi = 2,752	m3	1	79,70
32	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2000 (Jarak DA ≥ 16 Nmil) Kap. Produksi =1,936 m3 / hari	m3	1	113.300,00
33	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2900 (Jarak DA ≤ 6 Nmil) Kap. Produksi =5.823 m3 /hari	m3	1	44.800,00
34	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2900 (Jarak 6 < DA ≤ 12 Nmil) Kap.Produksi = 4.773 m3/hari	m3	1	55.100,00
35	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2900 (Jarak 12 < DA ≤ 16 Nmil)Kap.Produksi = 3.990 m3/hari	m3	1	65.400,00
36	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 2900 (Jarak DA ≥ 16 Nmil)Kap. Produksi =2.807 m3 /hari	m3	1	93.000,00
37	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 4000 (Jarak DA ≤ 6 Nmil)Kap. Produksi =8.032 m3 /hari	m3	1	43.200,00
38	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 4000 (Jarak 6 < DA ≤ 12 Nmil)Kap.Produksi = 6.528 m3/hari	m3	1	53.200,00
39	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 4000 (Jarak 12 < DA ≤ 16 Nmil)Kap.Produksi = 5.504 m3/hari	m3	1	63.100,00
40	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 4000 (Jarak DA ≥ 16 Nmil)Kap. Produksi= 3.872 m3 /hari	m3	1	89.700,00
41	Pengerukan dengan Kapal Clamshell 5,5 M3 & 2 SB 500 (750 PK) (Jarak DA ≤ 6Nmil)Kap. Produksi = 1.800 m3 /hari	m3	1	54.100,00
42	Pengerukan dengan Kapal Clamshell 5,5 M3 & 2 SB 500 (750 PK) (Jarak 6 < DA ≤ 12 Nmil)Kap. Produksi = 1.376 m3 /hari	m3	1	70.700,00
43	Pengerukan dengan Kapal Clamshell 5,5 M3 & 2 SB 500 (750 PK) (Jarak 12 < DA ≤ 16 Nmil)Kap. Produksi = 1.176 m3 /hari	m3	1	82.800,00
44	Pengerukan dengan Kapal Clamshell 5,5 M3 & 2 SB 500 (750 PK) (Jarak DA ≥ 16Nmil)Kap. Produksi= 856 m3 /hari	m3	1	113.700,00
45	Mobilisasi Kapal Type TSHD 2000	mil	1	1.015.500,00
46	Mobilisasi Kapal Type TSHD 2900	mil	1	1.198.300,00
47	Mobilisasi Kapal Type TSHD 4000	mil	1	1.520.900,00
48	Mobilisasi Kapal Type Clamshell Digandeng dengan Tug Boat 2 x 1000 PK	mil	1	1.352.800,00
49	Pekerjaan Pembangunan Menara Suar 40 M Di Darat (KonstruksiBaja Galvanis)	Paket	1	4.472.137.272,00
50	Pekerjaan Pembangunan Menara Suar 40 M Di Darat (KonstruksiBeton)	Paket	1	6.531.733.206,00
51	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 30 M Di Darat (KonstruksiBaja Galvanis)	Paket	1	1.679.847.903,00
52	Pekerjaan Pembangunan Menara Suar 30 M Di Darat (KonstruksiBeton)	Paket	1	3.814.755.167,00
53	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 20 M Di Darat (KonstruksiBaja Galvanis)	Paket	1	1.247.941.001,00
54	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 20 M Di Darat (KonstruksiBeton)	Paket	1	2.234.259.878,00

55	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 15 M Di Darat (Konstruksi Baja Galvanis)	Paket	1	986.958.410,00
56	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Darat (Konstruksi Baja Galvanis)	Paket	1	877.333.665,00
57	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Darat (Konstruksi Beton)	Paket	1	821.342.791,00
58	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 15 M Di Laut (Konstruksi Baja Galvanis)	Paket	1	992.795.904,00
59	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Laut (Konstruksi Baja Galvanis)	Paket	1	1.041.199.765,00
60	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Laut (Konstruksi Beton)	Paket	1	1.086.574.581,00
61	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 15 M Di Darat (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	832.636.576,00
62	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Darat (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	737.460.808,00
63	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 7,5 M Di Darat (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	658.591.000,00
64	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 15 M Di Laut (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	1.002.521.125,00
65	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 10 M Di Laut (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	957.588.765,00
66	Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 7,5 M Di Laut (Modular Pipe Beacon)	Paket	1	927.701.765,00
67	Pengerukan dengan Kapal Non Hopper - Karang (95.040 m3)	Paket	1	27.728.498.335,69
68	Pengerukan dengan Kapal Hopper TSHD 4000	Paket	1	332.392.416,16
70	Pengadaan Bus Air Roro 30 pax type Katamaran 14 meter (DAK)	unit	1	9.590.945.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

 Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 196508181992031022

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

PERKERETAAPIAN

No	NAMA PEKERJAAN	unit	Volume	Harga Satuan
1	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.33/38 Menjadi Bantalan Beton Rel R.42	m'sp	1	3.390.559
2	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.42/54 Menjadi Bantalan Beton Rel R.42/54	m'sp	1	3.037.069
3	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.42 Menjadi Bantalan Beton Rel R.54	m'sp	1	3.508.706
4	Pengadaan / Pembangunan Kereta Makan (MP3) Dilengkapi AC	kereta	1	47.621.147.249
5	Pengadaan / Pembangunan Kereta Ekonomi (K3) Dilengkapi AC Tanpa Dilengkapi Fasilitas Penyangga Cacat	kereta	1	4.012.231.762
6	Pengadaan / Pembangunan Kereta Ekonomi (K3) Dilengkapi AC Dilengkapi Fasilitas Penyangga Cacat	kereta	1	3.999.011.035
7	Pembangunan Jalan KA Baru 1 km' Jalan Rel dengan Satu Emplasemen 2 Spoor Sidding Sepanjang 400 m	km'sp	1	25.649.474.962
8	Pembangunan Jembatan Baja KA	paket	1	81.404.182.571
9	Pembangunan Gardu Traksi/Substation Kereta Api	paket	1	42.325.157.997
10	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.33/38 Menjadi Bantalan Beton Rel R.42	m'sp	1	3.082.325.978
11	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.42/54 Menjadi Bantalan Beton Rel R.42/54	m'sp	1	2.760.971.584
12	Peningkatan Jalan KA Penggantian Bantalan Kayu Rel R.42 Menjadi Bantalan Beton Rel R.54	m'sp	1	3.189.732.631
13	Pengadaan / Pembangunan Kereta Makan (MP3) Dilengkapi AC	unit	1	4.329.224.771
14	Pengadaan / Pembangunan Kereta Ekonomi (K3) Dilengkapi AC Tanpa Dilengkapi Fasilitas Penyangga Cacat	unit	1	3.635.464.576
15	Pembangunan Jembatan Baja KA	paket	1	74.003.802.336
16	Pembangunan Jalan KA Baru 1 km' Jalan Rel dengan Satu Emplasemen 2 Spoor Sidding Sepanjang 400 m	km'sp	1	23.317.704.510
17	Pembangunan Gardu Traksi/Substation Kereta Api	gardu	1	38.477.416.360

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA

LAMPIRAN XIV PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
 TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

KEBANDARUDARAAN

NO	NAMA PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGASATUAN
1	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Aspal Penetrasi, Tebal = 7,5 Cm (m2)	m2	1	195,22056
2	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Aspal Penetrasi, Tebal = 5 Cm	m2	1	120,58051
3	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Aspal Kolakan, Tebal = 7,5 Cm	m2	1	212,90405
4	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Aspal Kolakan, Tebal = 5 Cm	m2	1	137,00724
5	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Aspal Beton (AC), Tebal = 7,5 Cm	m2	1	282,41929
6	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Aspal Beton (AC), Tebal = 5 Cm	m2	1	184,39325
7	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Asphalt Treated Base (ATB), Tebal = 7,5 Cm	m2	1	245,59916
8	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Asphalt Treated Base (ATB), Tebal = 5 Cm	m2	1	170,0394
9	Pekerjaan Pelapisan Apron/Runway/Taxiway Dengan Cement Treated Base Course (CTBC), Tebal = 25 Cm	m2	1	249,8994
10	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan) Dengan Beton Semen (Rigit Pavement) Tebal = 35 Cm	m2	1	2.337.976,85
11	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan) Dengan Aspal Beton Tebal Rata-Rata 7,5 Cm	m2	1	957,14512
12	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan) Dengan Aspal Beton Tebal Rata-Rata 5 Cm	m2	1	924,90539
13	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan) Dengan Aspal KolakanTebal Rata-Rata 7,5 Cm	m2	1	635,9201
14	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan Dengan Aspal Kolakan Tebal Rata-Rata 5 Cm	m2	1	868,80015

15	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan Dengan Aspal Penetrasi Tebal Rata-Rata 7,5 Cm	m2	1	618,23661
16	Konstruksi Perkerasan Baru (Perpanjangan/Perluasan) Dengan Aspal Penetrasi Tebal Rata-Rata 5 Cm	m2	1	543,59655
17	Pekerjaan pengecatan / Marking	m2	1	74,02029
18	Pengadaan dan Pemasangan Garbarata	paket	1	12.139.656.600,00
19	Pengadaan Dan Pemasangan Peralatan Walk Through Metal Detector (Belum Termasuk Biaya Pengiriman Dan Asuransi)	paket	1	110.725.910,00
20	Pengadaan Dan Pemasangan Multi View X-Ray Cabin	paket	1	1.861.575.750,00
21	Pengadaan Dan Pemasangan Multi View X-Ray Bagasi	paket	1	2.801.775.750,00
22	Pengadaan Dan Pemasangan Multi View X-Ray Cargo	paket	1	4.667.775.750,00
23	Pengadaan Dan Pemasangan X-Ray Cargo Dengan Threat Image Protection (TIP) (Belum Termasuk Biaya Pengiriman Dan Site Training)	paket	1	956.775.750,00
24	Pengadaan Dan Pemasangan X-Ray Bagasi Dengan Threat Image Protection (TIP) (Belum Termasuk Biaya Pengiriman Dan Site Training)	paket	1	715.575.750,00
25	Pengadaan Dan Pemasangan X-Ray Cabin Dengan Threat Image Protection (TIP) (Belum Termasuk Biaya Pengiriman Dan Site Training)	paket	1	639.575.750,00
26	Pemasangan / Instalasi Jaringan FIDS	paket	1	290.557.778,03
27	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)2500x45 PA(Led)	paket	1	6.270.984.732,61
28	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1850x45 PA(Led)	paket	1	5.483.769.606,56
29	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1850x45 PA	paket	1	5.447.769.606,56
30	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1850x45 NPA	paket	1	4.963.313.391,23
31	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1850x30 (led)	paket	1	5.263.277.087,84
32	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1850x30	paket	1	5.227.277.087,84
33	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1400x30	paket	1	5.005.407.354,14
34	Pengadaan dan Pemasangan AFL (R/W Light, T/W Light, Apron Light, THR Light, WDI, ROB dan Remote Control Desk)1400x30 (led)	paket	1	5.041.407.354,14
35	Pengadaan dan Pemasangan RTIL (Runway Threshold Identification Light)	paket	1	724.882.240,09
36	Pengadaan dan Pemasangan PAPI (Precision Approach Path Indicator) 1 Ujung 1 Sisi	paket	1	964.668.826,84

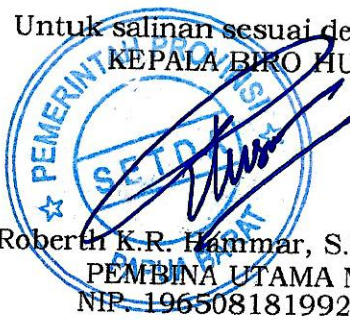
37	Pengadaan dan Pemasangan PAPI (Precision Approach Path Indicator) 2 Ujung 1 Sisi	paket	1	1.780.050.255,38
38	Pengadaan dan Pemasangan MALS (mediumintensity approach lighting system)	paket	1	2.085.686.450,30
39	Pengadaan dan Pemasangan PALS (pilot activated lighting system) CAT I DAN SQFL (dengan inset)	paket	1	8.184.276.934,36
40	Pengadaan dan Pemasangan PALS (pilot activated lighting system) CAT I DAN SQFL	paket	1	8.064.173.067,16
41	Pengadaan dan Pemasangan PIDS	paket	1	571.312.000,00
42	Pengadaan dan Pemasangan Closed Circuit Television (CCT)	paket	1	763.577.000,00
43	Pengadaan dan Pemasangan Access Door	paket	1	126.174.100,00

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN XV PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

Jasa Konsultansi

HARGA BARANG DAN JASA

NO	SUB KEGIATAN	KUALITAS	SATUAN	STANDART HARGA	IKK MANOKWARI	JUMLAH HARGA
1	Perencanaan FS/DED/SID/RIP/Masterplan/Studi Perencanaan kapal ro-ro 70 pax (DAK)	1,00	Paket			200.000.000,00
2	Pengawasan Pengawasan kapal ro-ro 70 pax (DAK)	1,00	Paket			627.165.000,00

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA

LAMPIRAN XVI PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
 TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

KETENAGALISTRIKAN

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Jaringan Listrik Rumah Tangga Sederhana (RTS)	Unit	4.288.500	
2	Jaringan Listrik Pedesaan (JTM)	KMS	744.900.000	
3	Jaringan Listrik Pedesaan (JTR)	KMS	520.267.000	
4	Jaringan Listrik PJJ	Tiang	21.275.000	

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
 PEMBINA UTAMA MADYA

LAMPIRAN XVII PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
 TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (DAK)

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pembangunan Turap Penahan Tanah (revetment) Pelabuhan Perikanan (PP) Dulanpompok	Meter	8.000.000	DAK
2	Peningkatan Dermaga Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	Meter3	36.000.000	DAK
3	Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Perikanan (PP) Dulanpompok	Meter3	10.000.000	DAK
4	Pembangunan Drainase Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	Meter	1.700.000	DAK
5	Pembangunan Fasilitas Air Bersih (Air Tawar bersih) Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	Paket	418.150.000	DAK
6	Pembangunan Fasilitas Air Bersih (Air Tawar bersih) Pelabuhan Perikanan (PP) Katapop	Paket	900.000.000	DAK
7	Pembangunan Pos Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (PP) Katapop	Meter Persegi	6.500.000	DAK
8	Pengadaan Alat Komunikasi Pelayaran dan Komunikasi Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (PP) Katapop	Paket	400.000.000	DAK
9	Pengadaan Alat Komunikasi Pelayaran dan Komunikasi Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (PP) Sorong	Paket	400.000.000	DAK

10	Rehabilitasi Bak Pemijahan, Kolam Induk dan Kolam Calon Induk BBIS Masni	Paket/ 100 meter persegi	100.000.000	DAK
11	Rehabilitasi Bangunan Panti Benih BBIS Masni	Paket	140.000.000	DAK
12	Pengadaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk BBIS Masni	Paket	84.000.000	DAK
13	Pembangunan Pondok Jaga Kawasan Konservasi (KKPD) Kaimana	meter2	9.000.000	DAK
14	Pengadaan Sarana Monitoring Biofisik Target Konservasi (Alat Selam, GPS dan Camera Underwater) Konservasi KKPD Kaimana	Paket	150.000.000	DAK
15	Pengadaan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi KKPD Kaimana	Paket	172.500.000	DAK
16	Pengadaan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi KKPD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch (Seksi II KKPD Kaimana)	Paket	172.500.000	DAK
17	Pengadaan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi KKPD Jeen Womom	Paket	172.500.000	DAK
18	Pengadaan Speedboat Konservasi Perairan KKPD Kaimana	Unit	760.000.000	DAK
19	Pengadaan Speedboat Konservasi Perairan KKPD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch (Seksi II KKPD Kaimana di Fakfak)	Unit	760.000.000	DAK
20	Pengadaan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi KKPD Jeen Womom Tambrauw	Unit	760.000.000	DAK
21	Perencanaan Pembangunan Turap Penahan Tanah (revetment) Pelabuhan Perikanan (PP) Dulanpokpok	paket	92.000.000	P. DAK
22	Pengawasan Pembangunan Turap Penahan Tanah (revetment) Pelabuhan Perikanan (PP) Dulanpokpok	paket	138.000.000	DAK
23	Perencanaan Peningkatan Dermaga Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	paket	200.000.000	P. DAK
24	Pengawasan Peningkatan Dermaga Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	paket	300.000.000	DAK

25	Perencanaan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Perikanan (PP) Dulanpokpok	paket	30.000.000	P. DAK
26	Pengawasan Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Perikanan (PP) Dulanpokpok	paket	40.000.000	DAK
27	Perencanaan Pembangunan Drainase Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	paket	40.500.000	P. DAK
28	Pengawasan Pembangunan Drainase Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	paket	52.000.000	DAK
29	Perencanaan Pembangunan Fasilitas Air Bersih (Air Tawar bersih) Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	paket	16.000.000	P. DAK
30	Pengawasan Pembangunan Fasilitas Air Bersih (Air Tawar bersih) Pelabuhan Perikanan (PP) Klademak	paket	20.500.000	DAK
31	Perencanaan Pembangunan Fasilitas Air Bersih (Air Tawar bersih) Pelabuhan Perikanan (PP) Katapop	paket	27.000.000	P. DAK
32	Pengawasan Pembangunan Fasilitas Air Bersih (Air Tawar bersih) Pelabuhan Perikanan (PP) Katapop	paket	36.000.000	DAK
33	Perencanaan Pembangunan Pos Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (PP) Katapop	paket	15.500.000	P. DAK
34	Pengawasan Pembangunan Pos Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (PP) Katapop	paket	19.500.000	DAK
35	Perencanaan Rehabilitasi Kolam Pemijahan, Kolam Induk dan Kolam Calon Induk BBIS Masni	paket	168.000.000	P. DAK
36	Pengawasan Rehabilitasi Kolam Pemijahan, Kolam Induk dan Kolam Calon Induk BBIS Masni	paket	200.000.000	DAK
37	Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Panti Benih BBIS Masni	Paket	10.000.000	P. DAK
38	Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Panti Benih BBIS Masni	Paket	14.000.000	DAK
39	Perencanaan Pembangunan Pondok Jaga Kawasan Konservasi (KKPD) Kaimana (Kambala, Adi Jaya, Togarni dan Boiya)	Paket	50.000.000	P. DAK

40	Pengawasan Pembangunan Pondok Jaga Kawasan Konservasi (KKPD) Kaimana (Kambala, Adi Jaya, Togarni dan Boiya)	Paket	65.000.000	DAK
41	Perencanaan Pengadaan Speedboat Konservasi Perairan KKPD Kaimana	Paket	22.500.000	P. DAK
42	Pengawasan Pengadaan Speedboat Konservasi Perairan KKPD Kaimana	Paket	30.000.000	DAK
43	Pengawasan Pengadaan Speedboat Konservasi Perairan KKPD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch (Seksi II KKPD Kaimana di Fakfak)	Paket	22.500.000	P. DAK
44	Perencanaan Pengadaan Speedboat Konservasi Perairan KKPD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch (Seksi II KKPD Kaimana di Fakfak)	Paket	30.000.000	DAK
45	Perencanaan Pengadaan Speedboat Konservasi Perairan KKPD Jeen Womom Tamberauw	Paket	22.500.000	P. DAK
46	Pengawasan Pengadaan Speedboat Konservasi Perairan KKPD Jeen Womom Tamberauw	Paket	30.000.000	DAK

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. Robert K. R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196508181992031022

LAMPIRAN XVIII PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

JARINGAN INTERNET DAN WEBSITE

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Material & Jasa Instalasi Jaringan Fiber Optik 24 core	km	175.000.000	
2	Material & Jasa Instalasi ruang data center & NOC	set	60.000.000	
3	Material & Jasa Instalasi ruang smart Government	Gedung (5 ruangan)	25.000.000	
4	Pembangunan Sistem Informasi Kabupaten/Kota (Website)	Unit	15.000.000	
5	Pembangunan Sistem Counter Surveilancer	Unit	2.180.171.600	Rekomendasi Badan Siber dan Sandi Negara
6	Pembangunan Tower Triangle	Unit	273.114.000	

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA

LAMPIRAN XIX PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

PENGADAAN PERALATAN UTAMA SMK DAN SMA (DAK)

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengadaan peralatan praktik utama - Kompetensi Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti (SMK)	Paket	1.124.000.000	DAK
2	Pengadaan peralatan praktik utama - Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (SMK)	Paket	1.984.000.000	DAK
3	Pengadaan peralatan praktik utama - Kompetensi Keahlian Teknik Pembangkit Tenaga Listrik (SMK)	Paket	200.000.000	DAK
4	Pengadaan peralatan praktik utama - Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan (SMK)	Paket	500.000.000	DAK
5	Pengadaan peralatan praktik utama - Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan (SMK)	Paket	250.000.000	DAK
6	Pengadaan peralatan praktik utama - Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (SMK)	Paket	3.254.061.000	DAK
7	Pengadaan peralatan praktik utama - Kompetensi Keahlian Teknik Alat Berat (SMK)	Paket	2.500.000.000	DAK
8	Pengadaan peralatan praktik utama - Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri (SMK)	Paket	500.000.000	DAK
9	Pengadaan peralatan praktik utama - Kompetensi Keahlian Multimedia (SMK)	Paket	850.000.000	DAK
10	Pengadaan peralatan praktik utama - Kompetensi Keahlian Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan (SMK)	Paket	1.000.000.000	DAK

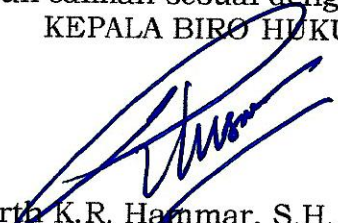
11	Pengadaan peralatan praktik utama - Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan (SMK)	Paket	984.000.000	DAK
12	Pengadaan peralatan praktik utama - Kompetensi Keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar (SMK)	Paket	1.400.000.000	DAK
13	Pengadaan peralatan praktik utama - Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata (SMK)	Paket	2.500.000.000	DAK
14	Pengadaan peralatan praktik utama - Kompetensi Keahlian Perhotelan (SMK)	Paket	1.400.000.000	DAK
15	Pengadaan peralatan praktik utama - Kompetensi Keahlian Tata Boga (SMK)	Paket	200.000.000	DAK
16	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK (SMK)	Paket	500.000.000	DAK
17	Pengadaan peralatan pendidikan IPA (SMA)	Paket	270.000.000	DAK
18	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK (SMA)	Paket	1.125.000.000	DAK
19	Pengadaan Media Pendidikan	Paket	180.000.000	DAK

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196508181992031022

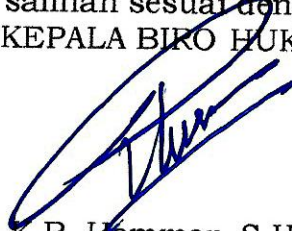
LAMPIRAN XX PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

PERANGKAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP (DAK)

No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengadaan Spectrophotometer UV VIS	Paket	350.000.000	DAK

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196508181992031022